

Judul : 9 Fraksi-Banggar DPR setuju dana kelurahan
Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 15

9 Fraksi-Banggar DPR Setujui Dana Kelurahan

JAKARTA—Rencana Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 tak banyak mendapat pertentangan dari DPR. Meski masih ada polemik dasar hukum kebijakan ini, sembilan fraksi dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemarin, menyetujui rencana program dana kelurahan masuk ke dalam APBN 2019. Anggaran Rp3 triliun tersebut akan masuk pos dana alokasi umum (DAU).

Satu-satunya fraksi yang belum menentukan sikapnya atas kebijakan baru Presiden Joko Widodo ini adalah Gerindra. "Semuanya setuju (dana kelurahan)," Gerindra belum (bersikap)," kata Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Said, penganggaran dana kelurahan cukup dengan landasan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) karena bakal disalurkan lewat DAU. Dengan jalur ini, dana kelurahan juga harus melalui persetujuan DPRD dan pemerintah daerah (pemda) setempat. "Tidak pakai cantolan hukum karena ini UU APBN dan itu disalurkan lewat DAU. Mekanismenya tidak seperti DAK (dana alokasi khusus)," jelasnya.

Anggaran dana kelurahan Rp3 triliun rencananya diambilkan dari dana desa yang totalnya Rp73 triliun. Lantaran mekanismenya tidak sama dengan dana desa, ada kemungkinan dana kelurahan ditolak oleh DPRD dan pemda setempat.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, jika merunut jumlah kelurahan sebanyak 8.400, nantinya setiap kelurahan bakal mendapat kucuran sekitar Rp330 juta dari pemerintah. Namun, dia mengakui DPR belum mengetahui kelurahan mana saja yang akan mendapatkan dana ini. Saat memberikan penjelasan di DPR, pemerintah hanya menunjukkan data di layar monitor tanpa menyerahkan kopian filenya. "Itu yang buat kami bingung. Katanya bahasa," ujarnya.

Pihaknya berharap bahwa dana kelurahan ini akan menjadi alokasi tahunan sama halnya pos dana desa, karena jika hanya dikucurkan pada 2019 maka hal itu akan dianggap sebagai kepentingan politik semata. Pagi ini DPR juga akan kembali membahas hal ini bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Moh Nizar Zahro mengatakan, fraksinya masih menyoroti dasar hukum kebijakan ini. Di sisi lain, pihaknya menilai program ini tidak termuat dalam pidato nota keuangan yang dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu.

Tidak pakai cantolan hukum karena ini UU APBN dan itu disalurkan lewat DAU. Mekanismenya tidak seperti DAK (dana alokasi khusus).

SAID ABDULLAH
Wakil Ketua Banggar DPR

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dasar hukum untuk alokasi anggaran dana kelurahan harus dibuatkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) baru.

"Memang harus dibuat PP-nya yang baru, tapi sekarang ini memang belum bisa (dialokasikan dana kelurahannya). Tapi akan diatur bagaimana aturannya, bagaimana payung hukumnya," kata Wapres JK di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

JK menjelaskan, penyusunan PP baru terkait dana kelurahan nantinya merujuk pada Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, karena pemerintah menganggap kedudukan desa dan kelurahan adalah sama.

"Ya pasti (merujuk UU Desa), tinggal diatur lah. (Tapi)

ini tadi belum jelas dari teman-teman (kementerian) itu mengusulkan sesuatu," ujar Wapres.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa belajar dari alokasi dana desa selama ini terbukti bisa memberikan efek luar biasa pada pembangunan di desa.

Begitu pula dana kelurahan, dia meyakini bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan badan usaha. "Kalau di desa ada Bumdes, ya dukung dong. Rakyat dikasih uang langsung kok enggak setuju," katanya.

Mengenai adanya anggapan bahwa kebijakan ini bermuatan politis, Arya menilai bahwa semua kegiatan positif Jokowi oleh pihak oposisi bisa ditafsirkan politis.

Juru bicara TKN lainnya, Irma Chaniago, menambahkan bahwa dana kelurahan memang baru dialokasikan pemerintah karena memang baru sejak setahun lalu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) datang ke Presiden Jokowi dengan berbagai keluhan. Salah satunya berharap adanya dana kelurahan.

"Mereka menuntut keadilan sistem dari pemerintah baik untuk desa dan kelurahan. Kemudian, pemerintah mengeluarkan dana bagi kelurahan. Jadi karena ada protes dari wali kota-wali kota seluruh Indonesia," katanya.

Menurutnya, program ini sebelum disetujui Presiden sudah dikaji Kementerian Keuangan dan institusi terkait.

"Memang belum ada payung hukum makanya Presiden akan segera membuat payung hukum agar program segera diluncurkan dan kelurahan bisa menggunakan dana ini untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur politikus Partai NasDem ini.

● **kiswondari/**
abdul rochim/ant